

**ANALISIS *MAŞLAĦAH* TERHADAP PENDAPAT KEPALA
KUA DI WILAYAH SURABAYA TENTANG PENGHAPUSAN
KETENTUAN SAKSI NIKAH DARI PPN DALAM PMA NO. 20
TAHUN 2019**

SKRIPSI

Oleh:

Hidayatullah

NIM. C01216016



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hidayatullah
NIM : C01216016
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis *Maṣlaḥah* terhadap Pendapat Kepala
KUA di Wilayah Surabaya tentang Penghapusan
Ketentuan Saksi Nikah dari PPN dalam PMA No.
20 Tahun 2019

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan
sumber rujukan.

Surabaya, 22 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Hidayatullah
C01216016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis *Maslahah* terhadap Pendapat Kepala KUA di Wilayah Surabaya tentang Penghapusan Ketentuan Saksi Nikah dari PPN dalam PMA No. 20 Tahun 2019” yang ditulis oleh Hidayatullah NIM. C01216016 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 21 Desember 2020

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

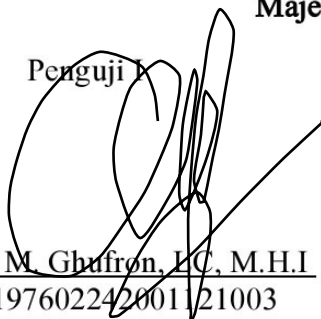
Dr. H. M. Ghufron, LC, MHI
NIP. 197602242001121003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hidayatullah NIM. C01216016 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I



Dr. H. M. Ghufron, L.C., M.H.I
NIP. 197602242001121003

Penguji II



Dr. Muflikhatul Khoirah, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Penguji III



Moh. Hatta, S.ag, M.H.I
NIP. 197110262007011012

Penguji IV



Ahmad Safiudin R., M.H
NIP. 199212292019031005

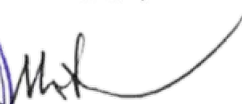
Surabaya, 6 Januari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan M.Ag
NIP. 1959040419880310031



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hidayatullah
NIM : C01216016
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : hidayatullah23494@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS *MAŞLAĤAH* TERHADAP PENDAPAT KEPALA KUA DI
WILAYAH SURABAYA TENTANG PENGHAPUSAN KETENTUAN
SAKSI NIKAH DARI PPN DALAM PMA NO. 20 TAHUN 2019**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juli 2021
Penulis


(Hidayatullah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian empiris dengan judul “Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Kepala KUA di Wilayah Surabaya tentang Penghapusan Ketentuan Saksi Nikah dari PPN dalam PMA No. 20 Tahun 2019.” Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu bagaimana pendapat Kepala KUA di wilayah Surabaya tentang penghapusan ketentuan saksi nikah dari PPN dalam PMA No. 20 tahun 2019, serta bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat Kepala KUA di wilayah Surabaya tentang penghapusan ketentuan saksi nikah dari PPN dalam PMA No. 20 tahun 2019.

Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang menghimpun data langsung ke lapangan terkait permasalahan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif yang berangkat dari permasalahan umum kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai pendapat Kepala KUA di Wilayah Surabaya tentang penghapusan ketentuan saksi nikah dari PPN dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan dikaji menggunakan teori *masalah mursalah* perspektif Sa'id Ramadhan Al Buti.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwasannya menurut pendapat Kepala KUA tentang Penghapusan Ketentuan Saksi Nikah Dari PPN dalam PMA No. 20 tahun 2019 lebih baik dihapus, karena seorang PPN sudah mempunyai tugas pokok dari pemerintah yaitu menghadiri, menyaksikan dan mencatat suatu pernikahan. Pendapat ini didasarkan kepada kemaslahatan pernikahan yaitu untuk menjamin keabsahan dalam suatu pernikahan, karena terkadang seorang PPN dipasrahi oleh keluarga atau wali dari mempelai wanita untuk menikahkan dengan cara taukil wali atau menjadi wali (wali hakim) sekaligus menjadi saksi nikah, jika semacam hal itu terjadi akan menyebabkan tidak sah suatu pernikahan. penjelasan ini sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam hukum Islam wali nikah dilarang merangkap menjadi saksi nikah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, dengan dihapusnya ketentuan saksi nikah dari PPN dalam PMA No. 20 tahun 2019 PPN juga tidak dilarang untuk menjadi saksi nikah, karena dalam hukum Islam memang tidak ada larangan dalam PPN menjadi saksi nikah yang penting seorang PPN tersebut sudah memenuhi syarat untuk menjadi saksi nikah maka boleh untuk seorang PPN menjadi saksi nikah. Hanya saja dalam administratif tidak etis jika seorang PPN menjadi saksi nikah, karena sudah mempunyai tugas sendiri dari pemerintah. Jika memang itu mengganggu tugas dari seorang PPN ketika menjadi saksi nikah maka lebih baik seorang PPN jangan menjadi saksi nikah cukup fokus dengan pekerjaannya saja.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Kajian Pustaka	12
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Penelitian.....	15
G. Definisi operational.....	15
H. Metode penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TEORI MAŞLAĦAH DAN SAKSI DALAM PERNIKAHAN	
A. Konsep Maşlahah.....	23
1. Pengertian Maşlahah	23
2. Dasar Hukum Maşlahah.....	26
3. Pembagian Maşlahah	26
4. Kehujjahan Maşlahah.....	32
B. Konsep Saksi Dalam Pernikahan	35
1. Pengertian Saksi dalam Pernikahan.....	35
2. Dasar Hukum Saksi dalam Pernikahan.....	36
3. Syarat-Syarat Saksi dalam Pernikahan.....	37
4. Kedudukan Saksi dalam Pernikahan.....	45

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt. telah menciptakan manusia di dunia ini dari jenis laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan berpasang-pasangan, saling menjaga satu sama lain, saling menyayangi dan mencintai serta bisa menyalurkan hasrat yang ada pada dirinya. Namun untuk melakukan hal tersebut, Allah Swt. memberikan jalan atau solusi dengan satu ikatan yang di dalam ajaran Islam disebut dengan perkawinan atau pernikahan.

Secara bahasa nikah berarti menghimpun. Nikah juga berarti bersetubuh atau akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna yang hakiki dari nikah sedangkan akad makna *majazi*.¹ Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah bagi setiap manusia, perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah Swt. sebagai jalan manusia untuk beranak, berkembang biak serta menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif untuk mencapai tujuan perkawinan.²

Perkawinan menurut istilah agama ialah “nikah” yang berarti suatu akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan berhubungan kelamin, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dengan

¹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 1.

² Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Uinsa press, 2014), 14.

Perkawinan dalam perspektif fikih disebut nikah berasal dari bahasa arab – زَوْج – زَوْجٌ – تَزْوِجًا dan “zawwaja” dari نَكَحَ – يَنْكِحُ – نِكَاحًا. Nikah secara etimologi berarti اللُّوْطُ (arti hakiki) yang artinya menindih, menghimpit, berkumpul, atau الضَّمُّ (arti kiasan) yang artinya bersetubuh atau العَقْدُ yang artinya akad atau perjanjian.⁵

Orang yang ingin melakukan pernikahan hendaknya harus menyiapkan terlebih dahulu mental dan fisiknya untuk mencapai tujuan pernikahan yang sangat

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo 2010), 114.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hikmah dalam suatu perkawinan yaitu dapat menjaga kehormatan diri serta pasangannya untuk terhindar dari apa yang diharamkan dan juga dapat menjaga komunitas manusia dari kepunahan dengan cara terus berkembang dan mempunyai keturunan.

Rukun pernikahan adalah sesuatu yang harus terwujud dalam suatu pernikahan. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang

⁹ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Surabaya: UINSA PRESS, 2014), 52.

¹² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 9-12.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas menerangkan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat pasal 14 yang menyatakan bahwa “untuk melaksanakan perkawinan harus ada:¹⁵

- Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat calon kedua mempelai telah di jelaskan dalam pasal 15 ayat (1) “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.” Dan dalam

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo 2010), 116.

Syarat bagi wali nikah dijelaskan dalam pasal 20 ayat (1) “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, akil dan baligh. Sedangkan syarat dari saksi nikah ada dalam pasal 25 “yang dapat di tunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.” Dan dalam pasal 26 “saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.” Kemudian syarat ijab qabul telah dijelaskan dalam pasal 27 yang berbunyi “ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.”¹⁷

¹⁶ Ibid., 117.

[illegible]

Dari pemaparan masalah di atas penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dan mengangkat judul skripsi “Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Kepala KUA Di Wilayah Surabaya Tentang Penghapusan Ketentuan Saksi Nikah Dari PPN Dalam PMA No. 20 Tahun 2019.”

1. Identifikasi Masalah

- a. Penghapusan saksi nikah dari PPN, Penghulu, dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi nikah.
- b. Pendapat Kepala KUA di wilayah Surabaya terhadap penghapusan ketentuan saksi nikah dari PPN, Penghulu, dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi nikah dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.
- c. Analisis *Maslahah* terhadap pendapat Kepala KUA di wilayah Surabaya tentang penghapusan ketentuan saksi nikah dari PPN, Penghulu, dan/atau Pembantu PPN dalam PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah di atas, maka identifikasi masalah yang ada di dalamnya agar lebih berfokus secara sistematis, maka penulis membatasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

- [illegible]

membahas tentang saksi yang ada dalam pernikahan, jadi perbedaannya terletak pada objek dari saksi tersebut.²¹

3. Skripsi yang ditulis oleh Mu'tashim Al Haq mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang.” Dalam skripsi ini menjelaskan tentang *Maṣlaḥah* adanya sidang terpadu terhadap isbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sampang serta prosedur dalam pelaksanaannya. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu ada dalam segi analisisnya, yaitu sama-sama menggunakan analisis *maṣlaḥah* yang menjadi kajiannya. Sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitiannya, skripsi ini fokusnya pada program *isbat* nikah terpadu, sedangkan fokusnya skripsi penulis pada penghapusan ketentuan saksi nikah dari PPN dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019.²²

Dari semua skripsi di atas penulis menyatakan bahwa penelitian dalam skripsi ini memang masih baru dan belum pernah ada penelitian dalam skripsi sebelum-sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

²¹ Siti Makmuriyanti Lestari, “Analisis Yuridis Terhadap Kesaksian Anak Kandung dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun” (skripsi--, IAIN Ponorogo, 2018).

²² Mu'tashim Al Haq, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang" (Skripsi--, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

- ## F. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

2. Secara praktis

G. Definisi Operasional

1. Analisis *Maṣlaḥah* yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* dalam penelitian ini adalah menganalisis pendapat kepala KUA tentang penghapusan ketentuan saksi dari PPN dalam pernikahan yang sebelumnya tidak memiliki dasar dalil, dan juga tidak ada ketentuan syarak, tetapi mengandung suatu kemaslahatan.
2. Pendapat Kepala KUA di wilayah Surabaya adalah Hasil pemikiran dari Kepala KUA di wilayah Surabaya tentang penghapusan ketentuan saksi dari PPN dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.
3. Saksi Nikah dari PPN dalam PMA adalah PPN singkatan dari Pegawai Pencatat Nikah. Saksi dari Pegawai Pencatat nikah yang bekerja di KUA yang bersangkutan dalam melangsungkan pernikahan.

Metode penelitian merupakan cara atau jalan untuk mencari, menggali serta membahas data untuk memperoleh kembali pemecahan permasalahan. Adapun langkah-langkah metode penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Supaya dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan maka data yang dikumpulkan oleh penulis sebagai berikut:

- a. Data berupa pasal 19 dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah.
 - b. Data berupa pasal 14 dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.
 - c. Pendapat Kepala KUA di wilayah Surabaya tentang penghapusan ketentuan saksi dari PPN dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.
2. Sumber penelitian ini ada dua, yaitu sumber primer dan sumber sknuder.
- a. Sumber primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian yang bersifat utama yang memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Sumber primer dalam penelitian adalah pendapat Kepala KUA di wilayah Surabaya tentang penghapusan ketentuan saksi dari PPN dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.
 - b. Sumber skunder adalah sumber yang digunakan untuk mendukung dan memperkuat sumber primer. Sumber skunder diperoleh dari referensi atau literatur yang berhubungan dengan penelitian ini seperti buku-buku, internet, jurnal, dan lain-lain.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat atau kelompok tertentu, dimana peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengetahui fenomena yang

terjadi terkait permasalahan yang diangkat peneliti. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*libraryresearch*) yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Serta menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat dalam perpustakaan untuk menunjang penelitian yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis membagi dua bagian dalam pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berlangsung secara lisan dan saling bertatap muka, untuk mendengarkan secara langsung informasi atau sejumlah keterangan. Dalam pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan orang yang bersangkutan untuk mendapat keterangan atau data dari pendapat Kepala KUA di wilayah Surabaya tentang penghapusan saksi dari PPN dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019.

b. Dokumentasi

Dokumen terdiri dari kata-kata dan gambar yang telah direkam tanpa campur tangan pihak peneliti.²³ Dalam dokumen ini segala hal yang berhubungan dengan penulisan ini seperti, dokumen tentang Kepala KUA, profil Kepala KUA, dan tugas Kepala KUA.

²³ Romy Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Yurimetri*, (Jakarta: Ghalia, 1994), 11.

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data dalam penelitian, penulis melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu pemeriksaan kembali dari data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b. Organizing

Yaitu dengan pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh, sehingga dapat menghasilkan bahan-bahan untuk menentukan deskriptif.²⁴

c. Analisis

Yaitu merangkum sejumlah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data kemudian menjabarkan dengan menggunakan kacamata yang penulis tulis di atas, sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan mencapai tujuan akhir penelitian. Dimana dalam teknik ini penulis dapat menyimpulkan menggunakan bahasa penulis mengenai analisis Masalah terhadap pendapat Kepala KUA tentang penghapusan ketentuan saksi dari PPN dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

Selain itu, penulis menggunakan pola pikir deduktif untuk menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh penulis

²⁴ Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), 34.

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, pengamatan, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang apa yang di teliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola. Dalam hal ini data yang dipaparkan adalah data tentang pemahaman Kepala KUA di wilayah Surabaya terhadap penghapusan ketentuan saksi dari PPN dalam PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, yang sebelumnya ada ketentuan saksi dari PPN dalam PMA No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah, kemudian data yang diperoleh dengan valid akan dianalisis menggunakan metode kualitatif dan dihubungkan dengan *Maslahah*.

Agar mempermudah dan memperjelas penelitian ini maka harus ada sistematika pembahasan. Penulis membagi sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang kerangka teori. Di dalamnya akan

Bab ketiga memuat data pendapat Kepala KUA hakim terhadap

Bab keempat, bab ini berisi tentang analisis data yang diperoleh dari bab

Bab kelima, bab ini merupakan penutup dari penelitian ini yang berisi

[illegible]

TEORI *MAŞLAHAH* DAN SAKSI DALAM PERNIKAHAN

1. Pengertian *Maṣlahah*

Dalam bahasa Indonesia *maṣlaḥah* dikenal dengan maslahat, berasal dari bahasa arab yaitu *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* secara etimologi sebagaimana dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti manfaat, faedah, bagus, kebaikan, atau kegunaan.¹ Dari beberapa makna ini dapat disimpulkan bahwa apapun yang mengandung manfaat didalamnya baik untuk memperoleh manfaat, kebaikan atau menolak kemudharatan maka itu disebut *maṣlaḥah*.

Adapun pengertian *Maṣlaḥah* secara terminologi, ada beberapa pendapat ulama', antara lain:

- a. Menurut pendapat Al-Khawārizmi sebagaimana dikutip Shaukani dalam kitab *Irshad Al-Fuhul*, yaitu:

Maṣlaḥah adalah memelihara tujuan hukum islam dengan menolak/menghindarkan bencana (kerusakan, hal-hal yang merugikan) dari makhluk (manusia).²

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634.

² Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ali Ash-Shaukani, *Irshad Al-Fuhul*, (Libanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1999), 270.

- b. Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Imam Abu Zahrah, bahwa yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* adalah:

الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ أَنْ يَرَى الْمُجْتَهِدُ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ يَجْلِبُ مَصْلَحَةً رَاجِحَةً، وَلَيْسَ فِي الشَّرْعِ مَا يَنْفِيهِ.

Maṣlaḥah adalah pandangan *mujtahid* tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syarak.³

- c. Menurut pendapat Jalaluddin Abdurrahman, mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai berikut:

المَصْلَحَةُ بِمَعْنَاهَا الْأَعْمَ كَمَا يَتَصَوَّرُهَا الْإِنْسَانُ : كُلُّ مَا فِيهِ نَفْعٌ لَهُ، سَوَاءٌ كَانَ بِالْجَلْبِ وَالتَّحْصِيلِ، كَتَحْصِيلِ الْقَوَائِدِ وَالذَّائِدِ أَوْ بِالدَّفْعِ وَالْإِزْتِئَاءِ، كَاسْتِئْجَادِ الْمَضَارِّ وَالْأَلَامِ

Maṣlahah dengan pengertian yang lebih umum dan dibutuhkan ialah semua yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.⁴

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari *maṣlaḥah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syarak bukan semata-mata kemaslahatan yang mengikuti tujuan keinginan dari hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa

³ Imam Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Taimiyah Hayatuh wa Asruh Ara'uh wa Fiqhuh*, (Mesir: Dar Al-Fikr Al- Arabi, 2000), 395.

⁴ Jalaluddin Abdurrahman, *Al-masalah Al-Mursalah Fi Al-Tasyri'*, (Mesir: Matba'ah Al-Sa'adah, 1983), 13.

kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang digariskan oleh *shari'* adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.⁵

Dalam konteks kajian ilmu *uṣul fiqh*, kata *maṣlaḥah* menjadi sebuah teknis dalam *shar'ī* untuk menetapkan hukum bagi hamba-hambanya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang menyimpang dari tujuan kelima tersebut.⁶ *Maṣlaḥah* merupakan salah satu metode yang digunakan ulama *uṣul fiqh* untuk menetapkan suatu hukum (*istinbat*) dengan menggunakan pendekatan *maqasid syariah* yang menekankan kepada aspek kemaslahatan umat Islam.

Dari berbagai pengertian *maṣlahah* di atas, dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* adalah sesuatu yang dianggap baik bagi akal sehat manusia dan menjauhkan keburukan bagi manusia serta sejalan dengan hukum syarak yang sudah ada.

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah*

Dasar hukum tentang *maṣlahah* dalam al-Qur'an tidak diterangkan secara jelas, akan tetapi ada ayat-ayat yang selaras dengan *Maslahah*.

⁵ Romli, SA, *Mugaranah Mazahib Fil Usul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158.

⁶ Abd, Wahab khallaf, *Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Majelis Ata'li Indonesia al-Dakwah al-Islamiyah, 1973), 116.

1) *Maṣlahah al-‘Ammah* (Maṣlahah Umum)

2) *Maṣlahah al-Ghalibah* (Maṣlahah Mayoritas)

3) *Maslahah al-Khassah* (Maslahah khusus/pribadi)

¹⁶ Asciarty, *“Pencrapan Maṣlaḥah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer”*, Jurnal Madani, 01(Juni, 2015), 123.

[illegible]

fash karena suaminya dinyatakan hilang (*maqfud*).¹⁸ Jika *maṣlaḥah* individu ini beretentangan dengan *maṣlaḥah* umum, maka *maṣlaḥah* umum yang didahulukan dari pada *maṣlaḥah* individu.¹⁹

c. *Maşlahah* dilihat dari segi keberadaannya menurut syarak

Maşlahah yang dilihat dari segi keberadaanya menurut hukum syarak ada tiga, yaitu:

1) *Maṣlaḥah Mu'tabarah* (Maṣlaḥah yang diakui)

Maṣlaḥah Mu'tabarah ialah *maṣlaḥah* yang dijelaskan dan diakui secara langsung oleh nash, seperti contoh melindungi jiwa manusia, dalam hukum Islam menerapkan *qisas* terhadap pembunuhan yang disengaja.²⁰ Sebagai mana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Swt. surat al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى، الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang

¹⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* ..., 116.

¹⁹ Jumanthoro, Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2005), 207.

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh penerjemah Saefullah Ma'shum*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 427.

ditolak atau diakui, akan tetapi peraturan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan shari'at, yaitu menjaga jiwa dan harta.²⁴

4. Kehujjahan *Maṣlahah*

Dalam penggunaan *maṣlahah* yang dijadikan sebagai hujjah untuk dijadikan hukum ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, adapun beberapa ulama yang berpendapat untuk dijadikan hukum dalam penetapan *maṣlahah* sebagai berikut:

- a. Menurut al-Būtī ada lima syarat yang harus dipenuhi untuk dijadikan sebagai hujjah atau lebih dikenal dengan *dawābīṭ al-Maṣlaḥah*. Kelima syarat itu antara lain:²⁵
- 1) Harus termasuk kedalam cakupan *maqāṣid al-syarī'ah* yang lima.
 - 2) Tidak bertentangan dalam nash al-Qur'an.
 - 3) Tidak bertentangan dengan al-Sunnah.
 - 4) Tidak bertentangan dengan Qiyas.
 - 5) Tidak bertentangan dengan *maṣlaḥah* yang lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih penting.
- b. Di dalam buku ilmu *uṣul fiqh* karangan Abdul Wahab Khilaf yang diterjemahkan oleh Halimatus, S.H syarat-syarat kehujjahan *maṣlaḥah* antara lain:²⁶

²⁴ Satria Efendi, M.Zein, *Ushul Fiqh...*, 238.

²⁵ Abbas Irfan, “*Maṣlaḥah dan Batasan-Batasan Menurut al-Buti*”, De Jure, No. 1 Vol. 5 (Juni, 2013), 92.

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikkih* diterjemahkan oleh Halimatus, S.H, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 101.

- 1) Harus merupakan kemaslahatan yang sesungguhnya atau nyata, bukan kemaslahatan yang semu tidak nyata. Yakni penetapan hukum syarak yang menolak bahaya atau mendatangkan manfaat. Jika penetapan hukum itu hanya didasarkan dengan adanya kemungkinan memunculkan manfaat, tanpa melihat terlebih dahulu hal tersebut merupakan penolakan terhadap bahaya atau tidak, maka hal tersebut merupakan kemaslahatan yang semu. Misalnya seperti dugaan adanya kemaslahtan dalam hal membatasi suami hingga menceraikan istrinya dan memberikan hakim dak dalam menjatuhkan talak pada semua kondisi.
- 2) Harus berupa kemaslahatan yang umum, Bukan kemaslahatan individu. Yakni dalam penetapan hukum syarak dalam kenyataannya harus menolak bahaya dan mendatangkan manfaat yang dirasakan oleh mayoritas bukan minoritas. Hukum tidak ditentukan berdasarkan kemaslahtan khusus dalam lingkup pemegang kekuasaan saja, akan tetapi dapat dikatakan bahwa hukum berlaku pada mayoritas bukan minoritas. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu kemaslahatan dalam penetapan hukum harus berlaku pada mayoritas manusia.
- 3) Harus berupa dalam menetapkan suatu hukum dengan tujuan kemaslahatan. Tidak boleh bertentangan dengan nash atau ijma'. Sebagai contoh kemaslahatan tidak sah jika dalam menetapkan hak anak laki-laki dan anak perempuan sama dalam warisan.

Kemasalahatan ini batal karena tidak sesuai dengan naş yang dalam al-Qur'an.

- c. Imam Ghazali menetapkan tiga syarat untuk *maṣlaḥah* yang dijadikan sebagai hujjah, antara lain:²⁷
- 1) Harus sesuai dengan tindakan-tindakan syarak dalam penetapan suatu hukum yang berasaskan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
 - 2) Tidak berlawanan atau bertentangan dengan nash syarak
 - 3) Harus berada pada tingkatan *darūriyyah* atau *ḥājiyyah* yang menempati *darūriyyah* baik yang berkaitan dengan kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal.

Dari beberapa penjelasan ulama tentang syarat kehujjahan *maṣlaḥah*, dapat dipahami agar *maṣlaḥah* bisa dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan suatu hukum harus memenuhi syarat-syarat diatas secara keseluruhan. Jika syarat-syarat tersebut dilihat maka akan ditemukan kemaslahatan yang sesuai dengan al-Qur'an, al-Sunnah, dan kemanfaatan bagi diri seseorang dan keseluruhan manusia yang kebutuhannya dalam tingkat *darūriyyah* atau *ḥājiyyah* yang masuk dalam lingkup *darūriyyah*.

B. KONSEP SAKSI DALAM PERNIKAHAN

1. Pengertian Saksi dalam Pernikahan

²⁷ Mas'adah, *Antisiapsi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer*, Ta'dibia, No. 2, Vol. 6, (November, 2016), 310.

Saksi juga dapat digunakan dalam forum pengadilan, yakni orang yang memberikan keterangan pada pengadilan untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Keterangan itu diberikan oleh orang yang melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang berguna untuk penyelidikan dan pengadilan dalam suatu perkara pidana.³⁰

[illegible]

ungkapan peristiwa yang benar dalam sidang pengadilan dengan mempergunakan lafal syahadat untuk menetapkan suatu atas diri orang lain.³¹

Dengan demikian saksi adalah orang yang melihat dengan mata kepala sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian. Adapaun saksi dalam pernikahan adalah orang yang melihat secara langsung bahawa terjadi suatu akad dalam pernikahan di suatu tempat.

2. Dasar hukum Saksi dalam Pernikahan

Adapun dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum dalam saksi pernikahan antara lain:

Dalam firman Allah Swt. QS At-Talaq 2, yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ.

Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.³²

Dan dalam QS Al-Baqarah 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى.

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.³³

Sedangkan dasar hukum saksi pernikahan dalam hadits sebagai berikut:

³¹ Ibid.

³² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: J-Art, 2004), 445.

³³ Ibid., 37.

Dua orang saksi harus bergama islam menurut kesepakatan para ulama, namun pendapat Hanafiyyah membolehkan ahli kitab menjadi saksi dalam pernikahannya seorang muslim dengan ahli kitab.

Anak-anak tidak dapat menjadi saksi, walaupun sudah mumayyis (menjelang baligh), karena kesaksian menerima dan menghormati pernikahan itu belum pantas. Kedua syarat tersebut sudah disepakati oleh fukaha dan kedua syarat itu dapat diajdikan satu, yaitu kedua saksi harus mukallaf.

Orang gila tidak dapat menjadi saksi.

Saksi harus memahami ucapan Ijab dan Qabul antara pihak-pihak yang berakad.

Menurut jumhur ulama saksi dalam pernikahan harus laki-laki, kecuali pendapat Hanafiyyah.

[illegible]

Saksi dalam pernikahan harus adil meskipun kita hanya bisa melihat lahiriyahnya saja.

Menurut pendapat Shafi'i saksi harus melihat, tetapi jumhul ulama melihat tidak dijadikan syarat dalam pernikahan cukup dengan bisa mendengar Ijab dan Qabul dan bisa membedakan suara wali dan calon pengantin laki-laki.³⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 24 dan 25 menjelaskan tentang saksi pernikahan. Pasal 24 ayat (1) menjelaskan tentang “saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.” Dan ayat (2) berbunyi: “setiap perkawinan harus disaksikan dua orang saksi.” Sedangkan dalam pasal 25 menjelaskan tentang syarat-syarat saksi dalam perkawinan yang berbunyi: “yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.”³⁷

³⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo 2010), 119

menjelaskan saksi nikah dalam pasal 19 yaitu: ayat (1) “akad nikah harus dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi.” Ayat (2) “saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat: laki-laki, beragama islam, baligh (berumur sekurang-kurangnya 19 tahun), berkal, merdeka, dan dapat berakal.” Ayat (3) “PPN, Penghulu dan/atau pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi.”³⁸

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) yang baru yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 menjelaskan saksi nikah dalam pasal 14 yang berbunyi ayat (1) “akad nikah dihadiri oleh orang dua saksi.” Ayat (2) “syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: laki-laki, beragama islam, baligh, berakal, dan adil.”³⁹

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menentukan syarat-syarat saksi dalam pernikahan. Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifāyah al-Akhyar* menyebutkan ada 6 syarat untuk menjadi saksi dalam pernikahan yaitu, Islam, Baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.⁴⁰

Menurut syekh Ibrahim al-Bajuri, bahwa syarat menjadi sksi dalam pernikahan adalah:

وَالشَّاهِدَانِ إِلَى سِتَّةِ شَرَائِطَ : الْأَوَّلُ الْإِسْلَامُ، الثَّانِي الْبُلُوغُ، الثَّلَاثُ الْعَقْلُ، الرَّبْعُ الْحَرِيَّةُ، الْخَامِسُ
الذُّكُورَةُ، الْسَّادِسُ الْعَدَلَةُ.⁴¹

41

Menurut Abu Zahrah mengemukakan syarat-syarat saksi dalam pernikahan ialah:

وَيُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ أَنْ تَكُونَ بِرَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، كَمَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْحَرِيَّةُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ، وَسَمَاعُ كَلَامِ الْعَاقِدَيْنِ وَفَهْمُهُ، وَالْإِسْلَامُ إِذَا كَانَ الزَّوْجَانِ مُسْلِمَيْنِ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْبَصَرُ وَلَا الْعَدْلَةُ عِنْدَ الْحَقِيقَةِ.⁴²

Dan disyaratkan pada saksi yaitu: dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan sebagaimana disyaratkan saksi itu merdeka, balig, berakal, mendengar ucapan yang berakad dan memahaminya, Islam apabila calon suami istri muslim dan tidak disyaratkan melihat dan adil menurut golongan hanafiyyah.

Sayyid sabiq menjelaskan tentang syarat-syarat saksi dalam pernikahan sebagai berikut:

يُسْتَرَطُ فِي الشُّهُودِ: الْعَقْلُ، وَالْبُلُوغُ، وَسِمَاعُ كَلَامِ الْمُتَعَايِدِينَ مَعَ فَهْمٍ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ عَقْدَ
الزَّوْاجِ.⁴³

Disyaratkan pada saksi berakal, balig, mendengarkan perkataan yang berakad serta memahami tentang maksud akad perkawinan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang yang menjadi saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain: berakal sehat, dewasa, mendengar ucapan kedua belah pihak yang berakad serta memahami ucapan itu adalah Ijab dan Qabul. Jika para saksi buta hendaknya

⁴² Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syaksiyyah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1957), 61.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: PT Al-Ma'arif, 1980), 48.

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat laki-laki untuk jadi saksi dalam pernikahan. bagi mayoritas ulama laki-laki menjadi syarat dalam pernikah. Tetapi menurut golongan Hanafiyyah tidak mensyaratkan demikian.⁴⁶

Dua orang saksi harus laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita, tidak sah akad nikah jika yang jadi saksi adalah dua orang wanita seperti firman Allah Swt. dalam QS Al-Baqarah 288:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ.

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi yang kamu ridhai.”⁴⁷

d. Jumlah saksi

Dalah pernikahan saksi sekurang-kurang berjumlah dua orang.

Jumhur ulama sependapat dalam hal ini.

e. Adil

Dalam kitab al-Fiqh al-Islamiy disebutkan bahwa adil yang dimaksud dalam persyaratan saksi ialah adil meski secara zahir saja. Adil itu sendiri memiliki arti orang yang memiliki ketulusan hati mengikuti ajaran-ajaran agama islam meski hanya luarnya saja.⁴⁸

Dengann demikian menjadi jelas bahwa saksi harus orang yang adil walaupun kita hanya dapat melihat luarnya saja. Yaitu orang yang

⁴⁶ Ibid., 150.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: J-Art, 2004), 48

⁴⁸ Wahbah az-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy*, Jus 9, (Beirut: Dar al-fikr, 1995), 67.

menjauhkan diri dari dosa besar dan tidak sering pula melakukan dosa kecil. Dosa besar seperti zina dan membunuh. Adapun dosa kecil seperti mengucpkan kata-kata kotor yang tidak pantas didengar.⁴⁹

f. Melihat dan mendengar

Saksi harus orang yang bisa melihat dan tidak bisa menjadi saksi bagi orang yang buta. Demikian pendapat yang kuat menurut syafi'iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama orang buta bisa menjadi saksi asalkan bisa mendengar dan membedakan suara orang yang berakad antara wali nikah dan calon pengantin laki-laki.

Saksi harus mendengar ucapan kedua belah pihak semuanya, sehingga apabila yang mendengar salah satunya saja yang lain tidak, ataupun ucapan dengan kedua orang yang berakad dan ucapannya alain maka tidak sah akad nikahnya. Karena saksi yang dikehendaki adalah hadirnya saksi yang menjadi rukun akad nikah dan rukun akad yaitu Ijab dan Qabul maka apabila saksi tidak mendengar ucapan ijab dan qabul maka tidak jelas saksi menjadi rukun dan tidak ditemukan syarat rukun.⁵⁰

4. Kedudukan Saksi dalam Pernikahan

Penulis telah menjelaskan di atas sebagaimana bahwa saksi dalam pernikahan adalah suatu hal yang penting dalam pernikahan. Hanya saja ulama berbeda pendapat dalam menempatkan saksi dalam pernikahan, apakah saksi termasuk dalam rukun nikah atau syarat nikah.

⁴⁹ Ibnu Mas'ud, Zainal 'Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, buku 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 624.

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 152.

Menurut Ulama Hanāfiyyah, kedudukan saksi dalam pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pernikahan bahkan ulama Hanāfiyyah memasukkan saksi sebagai unsur mutlak dalam pernikahan. Sebab menurut Hanāfiyyah kehadiran saksi dalam pernikahan merupakan syarat sahnya dalam pernikahan. Jika pernikahan tidak dihadiri oleh dua orang saksi maka pernikahan tersebut tidak sah. Kehadiran saksi dalam pernikahan terlihat dalam ungkapan Hanāfiyyah di bawah ini:

Golongan Hanfiah berpendapat: sesungguhnya saksi itu adalah hal yang utama dan merupakan suatu keharusan terhadap sahnya akad perkawinan.

Sementara itu dalam kitab *Al-Fiqid wa ‘Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili Juz VII, dinyatakan bahwa menurut jumhur ulama saksi dalam pernikahan termasuk dalam rukun nikah yang wajib dipenuhi dalam sahnya suatu akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak sah apabila dalam suatu

⁵² Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih 'Ala Mazhabil Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t,Th) 16.

pernikahan tidak adanya saksi. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ
وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدرقي).⁵³

Dari Aisyah r.a Dia berkata: Rasulullah saw. bersabda tidak (sah) suatu perkawinan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil (HR. ad-Daru Qutni).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبُعَايَا الَّتِي يَتَكَحَّنُ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (رواه البيهقي).⁵⁴

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda: pelacur ialah perempuan-perempuan yang mengawinkan dirinya sendiri tanpa bukti (saksi). (HR. Baihaqi).

Dengan dinyatakan perempuan yang menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya saksi adalah pelacur, maka saksi dalam pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam pernikahan yaitu sebagai rukun nikah.

5. Hikmah saksi dalam pernikahan

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh manusia, walau begitu akad nikah bukanlah suatu perjanjian kebendaan buka pula dimaksudkan untuk kebendaan. Saksi mempunyai peranan penting dalam suatu pernikahan dalam pembuktian apabila ada pihak ketiga yang meragukan pernikahan tersebut dan mencegah pengingkaran oleh salah satu pihak yang bersangkutan.

⁵³ Muhammad Ali al-Syaukuni, *Nailul Authar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) 30.

⁵⁴ Abi Isya Muhammad, *Jami' As-Sahih*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, t.th), 411.

BAB III

PENDAPAT KEPALA KUA DI WILAYAH SURABAYA TENTANG

PENGHAPUSAN SAKSI NIKAH DARI PPN DALAM PMA NOMOR 20

TAHUN 2019

A. Deskripsi KUA di Wilayah Surabaya

1. Letak Geografis

a. KUA Sawahan

Letak geografis suatu wilayah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kebijakan dan program kerja yang harus direncanakan dan dilaksanakan oleh seorang decision maker atau pejabat yang memimpin dalam suatu wilayah tersebut, karena itu al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan tanpa maksud dan tujuan, tetapi itu semua mengandung suatu nilai transformasi, edukasi dan akulturasi yang diharapkan suatu wilayah tertentu dapat menggali potensi yang lebih baik dari wilayah lain demi terciptanya kemajuan dalam suatu wilayah tersebut.

Oleh karena itu, dilihat dari segi geografisnya KUA Kecamatan Sawahan terletak di Wilayah Surabaya Selatan yang berada di sebelah barat Kantor Walikota Surabaya dengan jarak kurang lebih 7,5 KM.

1. Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Bubutan
2. Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Dukuh Pakis dan Wonokromo
3. Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Wonokromo dan Tegalsari
4. Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Sukomanunggal dan Dukuh Pakis

1. Kelurahan Petemon, terdiri dari 18 RW dan 123 RT
2. Kelurahan Sawahan, terdiri dari 13 RW dan 78 RT
3. Kelurahan Kupang Krajan, terdiri dari 7 RW dan 63 RT
4. Kelurahan Banyu Urip, terdiri dari 9 RW dan 91 RT
5. Kelurahan Putat Jaya, terdiri dari 14 RW dan 104 RT dan
6. Kelurahan Pakis terdiri dari 10 RW dan 63 RT.

1. Sebelah Utara: Jl. Dukuh Kupang Timur gang VII
2. Sebelah selatan: Jl. Dukuh Kupang Timur gang X
3. Sebelah Timur: Kantor Koramil

4. Sebelah Barat: Berbatasan dengan gang kecil¹

b. KUA Semampir

KUA Kecamatan Semampir berada di wilayah Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, memiliki luas Daerah kurang lebih $\pm 6,65 \text{ Km}^2$. Dengan ketinggian $\pm 4,6$ (Lima) meter diatas permukaan air laut. Banyaknya Curah Hujan : 179,65 mm dan suhu udara rata rata 37°C . Kecamatan Semampir merupakan daerah yang penduduknya sangat agamis, plural, dan primordial dengan jumlah penduduk mayoritas Madura dan Jawa dengan batas batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Madura
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Simokerto
3. Sebelah Barat : Kecamatan Pabean Cantikan
4. Sebelah Timur : Kecamatan Kenjeran²

c. KUA Bubutan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan pada tahun 1964 menempati sebuah langgar wakaf di Jl. Kawatan 12 No. 1 Surabaya dengan luas tanah 90,70 M dengan panjang 12,60 M dan lebar 7,20 M. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan termasuk wilayah geografis

¹ Dokumen KUA Saw.ahan

² Dokumen KUA Semampir

Pada tahun 2018 tepatnya bulan Desember, KUA Kecamatan Bubutan berpindah tempat di Jl. Demak Barat 1/3 Surabaya dikarenakan tempat semula kurang memadai dari segi ruangan ataupun fasilitas lainnya. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan terdiri tujuh ruangan, yaitu ruangan kepala KUA, ruang pelayanan, ruang pembuatan SIMKAH, ruang pengecekan pemberkasan, balai nikah, ruang berkas dan ruang untuk shalat.³

d. KUA Tambaksari

Letak geografis suatu wilayah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kebijakan dan program kerja yang harus direncanakan dan dilaksanakan oleh seorang *decision maker* atau pejabat yang memimpin dalam suatu wilayah tersebut, karena itu dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan tanpa maksud dan tujuan, namun itu semua mengandung nilai transformasi edukasi dan skukturasi yang diharapkan suatu wilayah tertentu agar dapat menggali potensi yang lebih baik dari wilayah lain demi terciptanya kemajuan dalam suatu wilayah tersebut.

³ Dokumen KUA Bubutan

Dilihat dari segi geografisnya KUA Kecamatan Tambaksari ini terletak di wilayah Surabaya Timur yang berada di sebelah Timur kantor Walikota Surabaya dengan jarak kurang lebih 2 km.

KUA Kecamatan Tambaksari terletak di Jl. Mendut No.7 Surabaya
dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : wilayah kecamatan Simokerto dan Bulak
2. Sebelah selatan : wilayah kecamatan Gubeng
3. Sebelah timur : wilayah kecamatan Mulyorejo
4. Sebelah barat : wilayah kecamatan Genteng

Adapun batasan lokasi sekitar KUA kecamatan Tambaksari adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Kantor Koramil dan Polsekta Tambaksari
2. Sebelah selatan : SDN Pacarkeling 5
3. Sebelah timur : Makam Islam Karang Gayam
4. Sebelah barat : kantor kecamatan Tambaksari⁴

e. KUA Sukomanunggal

Pada dasarnya dalam melakukan penelitian harus ada obyek penelitian yaitu mengenai letak geografis dimana penelitian tersebut dilakukan, karena dengan adanya letak geografis inilah akan didapatkan suatu data yang valid. Untuk itu sebelum melakukan penelitian harus

⁴ Dokumen KUA Tambaksari

diketahui terlebih dahulu dimana dan bagaimana letak geografis yang menjadi obyek penelitian tersebut.

Berdasarkan data monografi Tambak Lumpung merupakan salah satu daerah yang terletak di wilayah Kelurahan Sukoamanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya. Kelurahan ini terletak 2 Km dengan pusat pemerintahan Kecamatan, sedangkan dari Ibu Kota 8 Km Kabupaten atau Kotamadya. Dan 6 Km dari pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Adapun jumlah daerah-daerah yang berada di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya meliputi :

1. RW I : terdiri dari 9 RT
2. RW II : terdiri dari 7 RT
3. RW III : terdiri dari 5 RT

Sedangkan daerah-daerah lain yang membatasi daerah Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Kelurahan Asem Rowo
2. Sebelah selatan : Kelurahan Sonokwijenan
3. Sebelah barat : Kelurahan Tanjung Sari
4. Sebelah timur : Kelurahan Simo Mulyo

Sebagaimana wilayah Indonesia yang beriklim tropis, demikian juga dengan iklim Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya yang terdiri dari dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau.⁵

⁵ Dokumen KUA Sukomanunggal

2. Penghulu : Moenawar Cholil, S.Ag
3. Penyuluh Agama Islam : Dra. Siti Mahmudah
4. Jabatan Fungsional Umum : Khanafi, S.Ag¹⁰

B. Pendapat Kepala KUA di Wilayah Surabaya Terhadap Penghapusan Saksi Nikah Dari PPN Dalam PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan ditetapkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta. Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan menjelaskan saksi nikah dalam pasal 14 yang berbunyi:

- (1) Akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi
- (2) Syarat saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laki-laki
 - b. Beragama Islam
 - c. Baligh
 - d. Berakal; dan
 - e. Adil

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah menjelaskan saksi nikah dalam pasal 19 yang berbunyi:

- (1) Akad nikah harus dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi.

¹⁰ Dokumen KUA Sukomanunggal

a. Laki-laki

b. Beragama Islam

b. Beragama Islam

d. Berakal

d. Berakal

f. Dapar berlaku adil

f. Dapar berlaku adil

Pasal di atas sama-sama menjelaskan tentang saksi dalam pernikahan, namun ada perbedaan dalam kedua pasal tersebut. Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 saksi dalam pernikahan dijelaskan dalam pasal 19, dalam pasal tersebut berjumlah 3 ayat. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 saksi dalam pernikahan dijelaskan dalam pasal 14, dalam pasal tersebut berisikan 2 ayat. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tidak mencantumkan atau menghapus ketentuan ayat (3) yang berbunyi “PPN, Penghulu, dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi”. Maka dari itu penulis meminta pendapat Kepala KUA di Wilayah Surabaya terhadap penghapusan ketentuan ayat (3) “PPN, Penghulu, dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi”.

Pasal di atas sama-sama menjelaskan tentang saksi dalam pernikahan, namun ada perbedaan dalam kedua pasal tersebut. Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 saksi dalam pernikahan dijelaskan dalam pasal 19, dalam pasal tersebut berjumlah 3 ayat. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 saksi dalam pernikahan dijelaskan dalam pasal 14, dalam pasal tersebut berisikan 2 ayat. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tidak mencantumkan atau menghapus ketentuan ayat (3) yang berbunyi “PPN, Penghulu, dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi”. Maka dari itu penulis meminta pendapat Kepala KUA di Wilayah Surabaya terhadap penghapusan ketentuan ayat (3) “PPN, Penghulu, dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi”.

Adapun pendapat kepala KUA di Wilayah Surabaya terhadap penghapusan

saksi nikah dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan sebagai berikut:

Di hapusnya ketentuan tersebut tidak melarang PPN jadi saksi asalkan PPN tidak menjadi orang yang menikahkan (taukil wali atau wali hakim), tetapi beliau menyarankan agar PPN tidak menjadi saksi, karena sudah mempunyai tupoksinya sendiri. Selama beliau menjabat Kepala KUA tidak

pernah terjadi PPN menjadi saksi nikah karena orang yang mau menikah sudah membawa saksi.¹²

3. Meftahorrahan (Kepala KUA Bubutan)

Pendapat ketiga Bapak Kepala KUA Bubutan Meftahorrahman, beliau menjelaskan saksi adalah orang yang menghadiri pernikahan secara langsung. Saksi harus terdiri dari dua orang laki-laki, Islam, baligh, berakal. Mengenai pasal 19 ayat (3) “PPN, Penghulu dan Pembantu PPN bisa diterima sebagai saksi”. Maksud dari pasal itu ketika orang yang mau menikah tidak membawa saksi maka ketiga orang tersebut bisa jadi saksi asalkan ketiga orang tersebut tidak dipasrahi untuk menikah. Secara *shar’i* memang tidak melarang PPN untuk menjadi saksi yang penting syarat saksi terpenuhi, tetapi secara administrasi PPN mempunyai tugas mengawasi, menyaksikan benar-benar terjadi pernikahan atau tidak, sudah sesuai dengan *shar’i* dan undang-undang atau tidak.

Mengenai penghapusan ketentuan tersebut beliau setuju karena lebih Maşlahah dihapus. Maşlahah nya, dari segi etika tidak etis ketika PPN jadi saksi nikah. Kemudian dari segi administrasi PPN diberi tugas oleh pemerintah untuk menghadiri, menyaksikan, mencatat perkawinan. Dilihat dari tugas tersebut PPN bukan menjadi saksi nikah melainkan menjadi saksi dari pemerintah untuk menyaksikan apakah sudah benar menurut agama dan undang-undang pernikahan tersebut.

¹² Wawancara, Kepala KUA Semampir, Surabaya 09 September 2020

Pendapat keempat dari Bapak Kepala KUA Tambaksari H. Muhammad Yahya, MA, saksi dalam pernikahan harus ada, karena saksi merupakan salah satu rukun nikah. Dalam saksi ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, yaitu; berjumlah dua orang, laki-laki, Islam, balig, berakal.

Mengenai penghapusan pasal 19 ayat (3) dalam PMA No. 11 2007 “PPN, Penghulu dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi.” Beliau tidak mau berpendapat, karena beliau merupakan pegawai pemerintah yang harus menuruti semua undang-undang yang sudah disahkan pahit manisnya, baik buruknya harus diterima. Beliau tidak mau membanding-bandingkan PMA yang baru dengan yang PMA yang lama. Intinya beliau setuju dengan penghapusan tersebut.¹⁴

¹³ Wawancara, Kepala KUA Bubutan, Surabaya 05 Oktober 2020

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Alasan yang ketiga yaitu mengganggu tugas pokok dan fungsi dari seorang PPN. PPN mempunyai tugas pokok yaitu menghadiri, menyaksikan dan menyaksikan pernikahan. Jika PPN juga berperan sebagai saksi, maka itu akan mengganggu tugas pokok dari seorang PPN, dimana seorang PPN harus fokus ketika menjadi saksi karena takut ada salah kata dalam pengucapan akad nikah disisi lain seorang PPN harus fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang PPN. Jika PPN bertugas saksi nikah sekaligus bertugas untuk dirinya sendiri ditakutkan fokusnya akan terpecah belah.

[illegible]

Menurut beberapa Kepala KUA di wilayah Surabaya yang telah diwawancarai, meskipun ketentuan pasal 19 ayat (3) dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pencatatan Nikah dihapus, tetap tidak dilarang meskipun PPN jadi saksi nikah karena memang tidak ada larangan tertulis dalam Undang-undang asalkan PPN tersebut tidak dipasrahi oleh keluarga atau wali dari pengantin wanita untuk menikahkan, atau menjadi wali (wali hakim). Ketika seorang PPN yang dipasrahi oleh keluarga atau wali dari pengantin wanita atau menjadi wali (wali hakim), maka seorang PPN tersebut tidak bisa menjadi saksi nikah. Jika seseorang PPN merangkap menjadi orang yang menikahkan atau menjadi wali (wali hakim) maka menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah.

[illegible]

Menurut Penulis, pendapat Kepala KUA tentang penghapusan ketentuan pasal 19 ayat (3) dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Tentang Pencatatan Nikah mengenai PPN, Penghulu dan Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi nikah dengan alasan-alasan menyebabkan tidaknya sahnya pernikahan, menyebabkan terjadinya rangkap jabatan, mengganggu tugas pokok dan fungsi dari seseorang PPN, dan ketentuan tersebut jarang dipakai, alasan-alasan tersebut sebenarnya berkaitan antara satu dengan yang lainnya, dan alasan-alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan undang-undang yang sudah ada, karena jika sudah bertentangan dengan hukum Islam dan undang-undang maka pernikahan tidak sah. Ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”

[illegible]

B. Analisis *Maslahah* Terhadap Pendapat Kepala KUA Di Wilayah Surabaya Tentang Ketentuan Penghapusan Saksi Nikah Dari PPN Dalam PMA No. 20 Tahun 2019

Salah satu tujuan dari penghapusan ketentuan pasal 19 ayat (3) dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah mengenai “PPN, Penghulu dan Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi” agar terwujudnya suatu *maṣlahah*. Setiap sesuatu yang mengandung manfaat merupakan *maṣlahah* asalkan tidak bertentangan dengan syarak. Allah menurunkan syariat bertujuan untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Dalam hukum atau syarak nilai kebaikan yang terkandung dalam perbuatan manusia harus sesuai dengan tujuan syarak yang

[illegible]

saksi nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang wali hakim dalam pasal 23;

- (1) “wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.”
- (2) “dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.”

jika hal semacam itu terjadi (rangkap jabatan) yakni seorang PPN menjadi orang yang menikahkan dengan cara wakil wali atau wali (wali hakim) maka pernikahannya tidak sah, ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Dalam hal ini Islam melarang jika ada seorang PPN menjadi orang yang menikahkan sekaligus menjadi saksi nikah. Dalam kitab i’anatut thalibin menjelaskan:

وَشَرَطَ فِي الشَّاهِدَيْنِ أَهْلِيَّةَ شَهَادَةٍ تَأْتِي شُرُوطُهَا فِي بَابِ الشَّهَادَةِ وَهِيَ حُرِّيَّةٌ كَامِلَةٌ وَدُكُورَةٌ مُحَقَّقَةٌ وَعَدَالَةٌ وَمَنْ لَازِمُهَا الْإِسْلَامُ وَالتَّكْلِيفُ وَسَمْعٌ وَنُطْقٌ وَبَصَرٌ لِمَا يَأْتِي أَنَّ الْأَقْوَالَ لَا تَنْتَبِثُ إِلَّا بِالْمُعَايَنَةِ وَالسَّمْعِ. وَفِي الْأَعْمَى وَجْهٌ لِأَنَّهُ أَهْلٌ لِلشَّهَادَةِ فِي الْجُمْلَةِ، الْأَصَحُّ لَا وَإِنْ عَرَفَ الزَّوْجَيْنِ، وَمِثْلُهُ مَنْ بَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ وَمَعْرِفَةُ لِسَانِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ. وَعَدَمُ تَعْيْنِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا لِلْوِلَايَةِ.

Dan disyaratkan dalam menjadi saksi harus ahli dalam persaksian yang akan dijelaskan dalam bab persaksian. Syarat-syarat menjadi saksi ialah orang yang merdeka yang sempurna, laki-laki, adil, islam, mukallaf, bisa melihat, bisa berbicara, bisa mendengar. Ada yang berpendapat orang buta bisa menjadi saksi tetapi pendapat yang lebih shoheh tidak

لَوْ شَهِدَ أَخَوَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعَقَدَ الثَّلَاثُ بِغَيْرِ وَكَالَةٍ مِنْ أَحَدِهِمَا بِأَنْ أَدْنَتْ هَذَا الثَّلَاثُ الْعَاقِدَ فَقَطَّ صَحَّ النِّكَاحُ لِعَدَمِ كَوْنِهِمَا وَلَيَّتَيْنِ عَاقِدَتَيْنِ لَهَا حِينَئِذٍ. وَقَوْلُهُ وَلَا بِأَنْ عَقَدَ الثَّلَاثُ بِوَكَالَةٍ مِنْ أَحَدِهِمَا بِأَنْ أَدْنَتْ هُمَا وَكَلَا الثَّلَاثُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَدْنَتْ لِلثَّلَاثَةِ فِي النِّكَاحِ، وَقَوْلُهُ فَلَا: أَيُّ فَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ بِحُضُورِ الْأَخَوَيْنِ الْمَأْدُونِ هُمَا فِي النِّكَاحِ شَاهِدَيْنِ لِأَمَّامَا الْعَاقِدَانِ فِي الْحَقِيقَةِ، وَالْوَكِيلُ فِي النِّكَاحِ إِنَّمَا هُوَ سَفِيرٌ مُحَضَّرٌ.

Dari penjelasan diatas wali dan wakil wali tidak boleh merangkap menjadi saksi nikah. Jika wali dan waki wali merangkap menjadi saksi nikah maka pernikahan tersebut tidak sah. Penjelasan dari Kepala KUA yang menyebabkan tidak sahnya pernikahan termasuk kedalam memelihara agama dan memelihara keturunan, karena dalam sah tidaknya pernikahan harus sesuai

Masuk ke dalam *maṣlahah ḥajīyyah* akan menyulitkan administrasi dalam pencatatan pernikahan, dimana PPN yang disuruh untuk menjadi saksi nikah dalam pernikahan merangkap jabatan menjadi PPN dan saksi nikah, jika hal tersebut terjadi tidak etis dan akan menyulitkan administrasi dalam pernikahan dimana seorang PPN harus menanda tangani sebagai seorang PPN dan menanda tangani sebagai saksi nikah.

[illegible]

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dibahas oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Pendapat Kepala KUA di wilayah Surabaya tentang Penghapusan ketentuan saksi nikah dari PPN dalam peraturan menteri agama (PMA) No. 20 tahun 2019 lebih *maṣlahah* di hapus, karna jika tidak dihapus akan menyebabkan terjadinya rangkap jabatan pada seorang PPN, yakni menjadi orang yang menikahkan dan menjadi saksi nikah, jika semacam hal tersebut terjadi maka akan menyebabkan tidak sahnya suatu pernikahan. kemudian kurang etis atau tidak dibenarkan ketika seorang PPN menjadi saksi nikah, karena seorang PPN sudah tugas pokok dan fungsi sendiri.
2. Dari Pendapat Kepala KUA tentang penghapusan saksi nikah dari PPN dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 terdapat dua unsur kemaslahatan. Yang pertama menyebabkan tidak sahnya pernikahan termasuk dalam *maṣlahah ḥajīyyah*. Termasuk *maṣlahah ḥajīyyah* karena *maṣlahah ḥajīyyah* termasuk *maṣlahah* yang tidak akan mengganggu substansi kelayakan dan tatanan kehidupan manusia, namun bisa menyebabkan kesushan. Dalam hal ini jika seorang PPN

menjadi saksi nikah maka aka menyebabkan kesulitan dalam administrasi pernikahn.

B. Saran

Saksi nikah merupakan salah satu dari rukun nikah, meskipun dalam Peraturan Menteri Agama Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 sudah tidak diatur lagi tentang di perbolehkannya seorang PPN menjadi saksi nikah, seorang PPN tidak dilarang juga untuk menjadi saksi nikah. Jika ada orang yang mau nikah dan tidak membawa saksi, maka sebaiknya PPN meyarankan petugas KUA yang bisa bertanggung jawab untuk menjadi saksi nikah.

- Bahtiar, Deni Sutan . *Ladang Pahala Cinta Berumah Tangga Nenuai Berkah*, Jakarta: Amizah, 2012.
- Candrawati , Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Surabaya: UINSA PRESS, 2014.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: J-Art, 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Asy-syifa', 1984.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Efendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.
- Efendi, Satria. M, Zein, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Irfan, Abbas. *Maṣlaḥah dan Batasan-Batasan Menurut al-Buti*, De Jure, No. 1 Vol. 5 (Juni, 2013), 92.

Candrawati , Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Surabaya: UINSA PRESS, 2014.

Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: J-Art, 2004.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Asy-syifa', 1984.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Efendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.

Efendi, Satria. M, Zein, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Irfan, Abbas. *Maṣlaḥah dan Batasan-Batasan Menurut al-Buti*, De Jure, No. 1
Vol. 5 (Juni, 2013), 92.

- Jumantoro, Samsul Munir Amir. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2005.
- Kamali, Ahmad Faiz. “Penentuan Saksi Adil Dalam Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Dan Kecamatan Diwek”. Skripsi--, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- khallaf, Abd. Wahab. *Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Majelis Ata’li Indonesia al-Dakwah al-Islamiyah, 1973.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih* diterjemahkan oleh Halimatus, S.H., Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Lestari, Siti Makmuriyanti. “Analisis Yuridis Terhadap Kesaksian Anak Kandung dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”. skripsi--, IAIN Ponorogo, 2018.
- M. Armando, Nina. *Ensiklopedia Islam*, jilid 6. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Malik. *Al-Muwatta*. Muassah Zayid bin Sultan Ali Nahyan, 2004.
- Mas’adah. *Antisiapsi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer, Ta’dibia*, No. 2, Vol. 6, (November, 2016).
- Mas’ud, Ibnu. Zainal ‘Abidin. *Fiqh Mazhab Syafi’i*, buku 2. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Muhammad, Abi Isya. *Jami’ As-Sahih*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, t.th.
- Muhammad, Imam Al-Hafiz bin Ali Ash-Shaukani, *Irshad Al-Fuhul*. Libanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1999.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir*. Surabaya : Pustaka Progressif, 2002.

- Musarrofa, Ita, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat*, Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Pearaturan Menteri Agama No. 7 tahun 2007.
- Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019.
- Peraturan Menteri Agama No. 7 tahun 2007.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Usaha Keluarga t,th.
- SA, Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Usul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: PT Al-Ma'arif, 1980.
- Sanggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.
- Soemitro, Romy Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum Yurimetri*, Jakarta: Ghalia, 1994.
- Soemiyati, Ny. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.
- Syafa'at , Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Uinsa press, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN Malang press, 2007.
- Tirmizi. *Sunnan at-Tirmizi*, Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Zahrah, Muhammad Abu. *al-Ahwal al-Syaksiyyah*. Mesir: Dar al-Fikr, 1957.

